

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting pembangunan yang terus menjadi perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan. Perhatian ini dibuktikan melalui penyebutan aspek pendidikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Pembukaan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia ingin “Mencerdaskan kehidupan bangsa” (Balad, 2023). Berdasarkan tujuan tersebut, kita bisa memahami bahwa pemerintah ingin supaya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh pendidikan yang layak (Sitoresmi, 2023). Namun, perlu disadari bahwa upaya untuk mencapai tujuan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki tugas untuk memanfaatkan kesempatan belajar sebaik-baiknya hingga sampai pendidikan tinggi.

Melalui masyarakat yang cerdas, maka bukan menjadi tidak mungkin bagi Indonesia untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan berpijak pada pembukaan UUD 1945, maka dirumuskanlah sebuah visi, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” (Bappenas, 2024). Visi ini pun tertuang secara resmi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam visi tersebut tertulis empat pilar pembangunan, yaitu (Finaka, 2019)

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan; serta
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Merujuk pada empat pilar di atas, setidaknya ada satu pilar yang berkaitan erat dengan aspek pendidikan, yaitu pilar pertama. Pilar tersebut menekankan bahwa keberhasilan dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti mempercepat pemerataan pendidikan rakyat Indonesia, meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan

dan teknologi untuk pembangunan, serta meningkatkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup rakyat (Bappenas, 2019)

Namun, sayangnya hingga saat ini proses pencapaian visi itu masih belum berjalan dengan optimal. Indonesia kembali digemparkan dengan adanya kasus *bullying* yang terjadi dalam dunia pendidikan. Secara definisi, *bullying* merupakan tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan secara agresif untuk menyakiti seseorang (Simbolon, 2012). Umumnya tindak *bullying* menasar pada pihak yang kurang berdaya oleh pihak yang lebih berdaya dan berkuasa. Pada konteks pendidikan tinggi, senior dikatakan sebagai pihak yang lebih kuat dan berkuasa. Sedangkan, junior adalah pihak yang lebih lemah.

Menurut catatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setidaknya sudah ada 356 laporan perundungan yang diterima dari PPDS sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024 (Mashabi & Prastiwi, 2024). Berdasarkan laporan tersebut, Kemenkes mengungkapkan bahwa program studi penyakit dalam menjadi program studi yang paling banyak memberikan laporan perundungan dan disusul dengan program studi bedah, serta anestesi (Kautsar, 2024).

Meskipun demikian, belum semua kasus *bullying* berhasil dilaporkan dan didokumentasikan. Hal ini mengingat adanya intimidasi dan anggapan biasa dari para penguasa terhadap tindak perundungan (Nurdianto dkk., 2023). Jika, korban memaksa untuk melaporkan, maka kelangsungan karir sebagai dokter menjadi risikonya. Namun, apabila tidak melaporkan juga berpotensi menimbulkan situasi tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini terjadi karena banyaknya bentuk perundungan yang biasa dilakukan, seperti perintah membeli kebutuhan material, mencuci kendaraan, mengerjakan tugas senior, dan hal lain yang tidak manusiawi (Nurdianto dkk., 2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mahasiswa PPDS terjebak dalam situasi ‘maju kena mundur kena’.

Tentu bukan menjadi suatu hal yang benar untuk menolerir tindak *bullying* sebagai budaya normal di PPDS. Apalagi hal ini berkaitan dengan efek jangka panjang yang dapat timbul pada korban. Hal ini dapat

dibuktikan melalui hasil skrining kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu. Hasilnya 399 mahasiswa PPDS ditemukan memiliki indikasi keinginan untuk bunuh diri (Kautsar, 2024).

Nahasnya pada tanggal 12 Agustus 2024 seorang mahasiswa PPDS anestesi Undip ditemukan dalam keadaan meninggal di indekosnya yang beralamat di Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah (Anjelina & Afifah, 2024). Dugaan sementara, mahasiswa tersebut meninggal karena bunuh diri lantaran mengalami perundungan (Anjelina & Afifah, 2024). Merujuk pada hasil investigasi Kemenkes dan Kemendikbudristek, korban pernah dipaksa oleh sejumlah oknum senior untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp 20 juta-Rp 40 juta. Selain itu, bukti adanya kasus *bullying* menjadi semakin kuat setelah ditemukannya buku catatan harian dan rekaman suara berisi keluhan kesah dari korban (Anjelina & Afifah, 2024).

Dari keseluruhan data dan fakta, sudah seharusnya kasus ini menjadi alarm darurat bagi dunia pendidikan. Pendidikan yang seharusnya bisa menjadi tempat pengembangan diri malah justru diwarnai dengan tindakan-tindakan kurang menyenangkan. Jika, kasus ini terus dibiarkan, maka visi Indonesia Emas 2045 terancam untuk gagal. Hal ini mengingatkan bahwa salah satu sasaran dari RPJPN 2025-2045 adalah “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” (Bappenas, 2024). Peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, serta sikap dan etos kerja. Jadi, apabila pendidikan tidak dapat memberikan ruang yang nyaman untuk belajar, maka SDM Indonesia berpotensi untuk gagal dalam bersaing. Kesuksesan pencapaian visi akan bermula dari adanya pendidikan yang berkualitas.

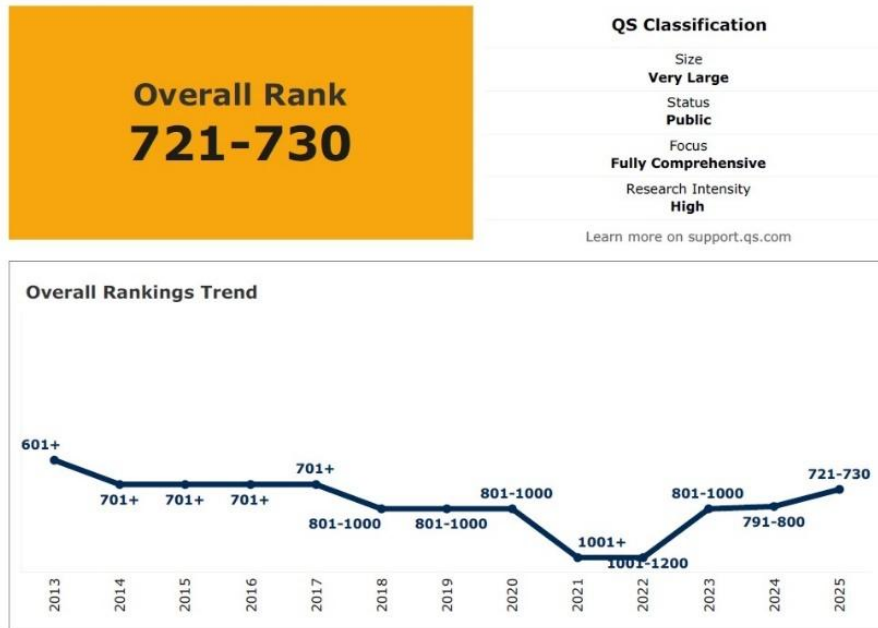
Sustainable Development Goals (SDGs) poin empat menyebutkan bahwa pendidikan berkualitas adalah perihal memastikan kualitas pendidikan berjalan secara inklusif dan merata hingga mampu meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang (United Nations, t.t.). Inklusifitas bisa dibangun melalui lingkungan pendidikan yang

ketercakupan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam target SDGs 4.7, yaitu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global (United Nations, t.t.). Target ini mengharuskan supaya di tahun 2030 nanti seluruh siswa dapat memperoleh pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan melalui pendidikan, Hak Asasi Manusia (HAM), serta promosi budaya damai tanpa kekerasan.

Namun, harapan ini seolah belum terjawab setelah Indonesia kembali digegerkan dengan kasus *bullying* yang menimpa mahasiswa PPDS Undip. Hal ini menjadi geger mengingat Undip merupakan PTN-BH yang memiliki segudang prestasi dan penghargaan. Sebagai contoh, pada 5 Juni 2024 Undip baru saja menduduki peringkat baru, yaitu di posisi 721-730 atau naik 70 peringkat menurut QS World University Ranking (Undip, 2024b). Bersamaan dengan ini, Undip juga menempati posisi terbaru di peringkat 43 regional Asia Tenggara dan peringkat 8 di Indonesia. Seluruh peringkat ini berhasil didapatkan oleh Undip dari sembilan aspek penilaian, meliputi *Academic Reputation*, *Citations per Faculty*, *Employer Reputation*, *Employment Outcomes*, *Faculty Student Ratio*, *International Faculty*, *International Research Network*, *International Students*, dan *Sustainability* (Undip, 2024b).

Overall Results

Diponegoro University



Gambar 1. 1 Tren Peringkat Undip

Selain itu, pada akhir 2022 lalu Undip juga diketahui baru memperoleh lima penghargaan nasional dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penghargaan yang berhasil diperoleh di antaranya adalah *bronze winner* untuk kategori PTN-BH subkategori LAPOR!, *bronze winner* untuk kategori perguruan tinggi negeri badan hukum subkategori Satuan kerja (Satker) dengan Pelaporan PDDikti Terbaik, *silver winner* untuk kategori PTN-BH subkategori Kerja Sama dengan Institusi Terbaik, serta *bronze winner* untuk kategori perguruan tinggi negeri badan hukum subkategori Pelaporan kerja sama (Lapkerma) Terbaik (Ifana, 2022).

Namun, kini penghargaan dan prestasi itu seolah lenyap begitu saja. Semua mata sekarang terfokus pada permasalahan *bullying* yang menimpa mahasiswa PPDS Undip. Sebagaimana diketahui bahwa tindak *bullying* merupakan bagian dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Nurdianto dkk., 2023). Dengan adanya kasus ini, tujuan pembangunan

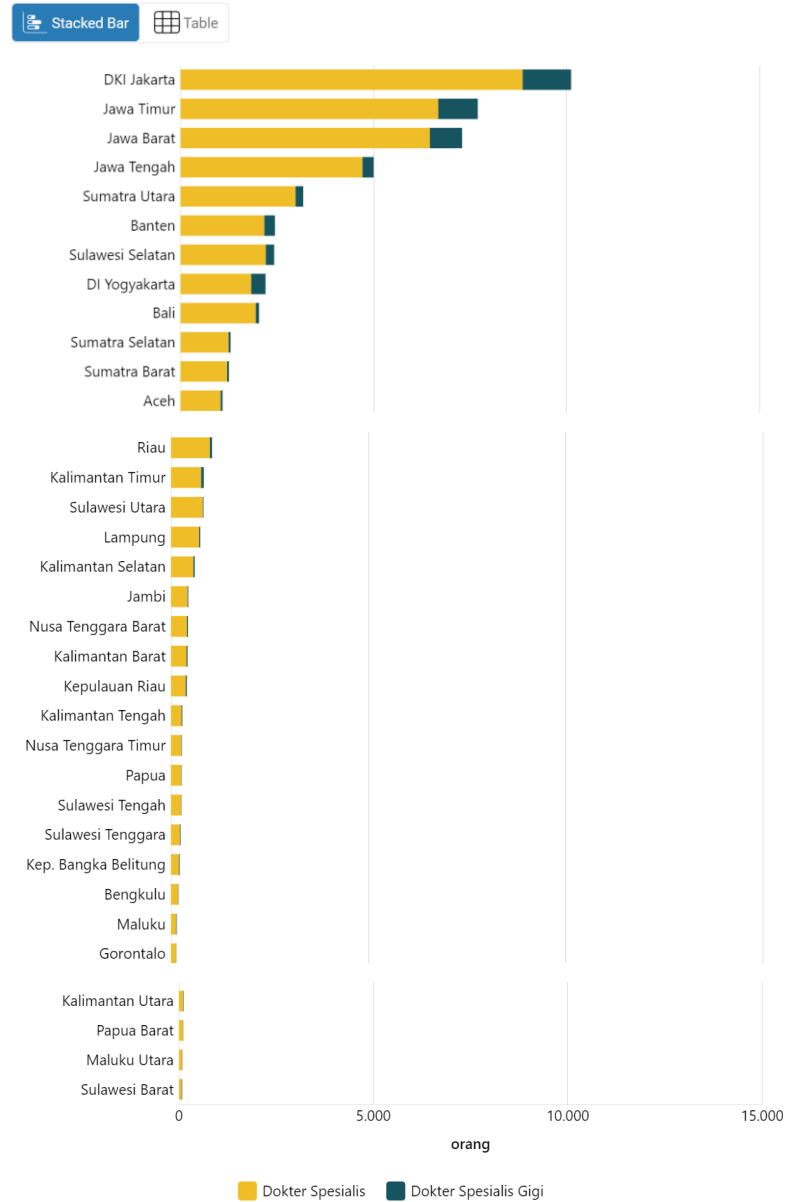
berkelanjutan poin tiga menjadi terancam untuk gagal. Pada SDGs poin tiga disebutkan tujuan berupa kehidupan sehat dan sejahtera. Guna mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu memenuhi beberapa indikator terlebih dahulu. Salah satu indikator yang dimaksud adalah kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (United Nations, t.t.). Nantinya kepadatan tenaga kesehatan di suatu wilayah akan diukur menggunakan rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk.

Merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2014 pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa tenaga kesehatan itu meliputi tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain (Indonesia, 2014). Kemudian, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis dispesifikkan lagi menjadi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis (Indonesia, 2014). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti PPDS sejatinya merupakan calon dokter spesialis potensial yang bisa membantu Indonesia untuk memenuhi indikator “Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan”.

Namun, sayangnya SDM potensial itu harus terancam dengan adanya *bullying* tadi. Secara langsung, *bullying* menjadi suatu tindakan yang menghambat Indonesia untuk memenuhi indikator SDGs dan mencapai Indonesia Emas 2045. Apabila jumlah tenaga dokter spesialis terus berkurang, maka nyawa rakyat Indonesia menjadi taruhannya. Hal ini mengingat ada 280 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan 30 ribu dokter spesialis untuk melayani (Al Machmudi, 2024).

Jumlah Dokter Spesialis di 34 Provinsi Indonesia (6 Desember 2022)

databoks



Gambar 1. 2 Data Jumlah Tenaga Dokter Spesialis di Indonesia

Per Desember 2022, diketahui bahwa tujuh macam dokter spesialis masih belum ditemukan di 41,68% Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Al Machmudi, 2024). Dalam sebuah siaran pers, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan waktu sampai 36 tahun untuk dapat memenuhi permintaan tenaga dokter spesialis (Ahdiat, 2022). Padahal saat ini hanya tersisa sekitar dua puluh tahun saja untuk menuju Indonesia Emas 2045. Waktu ini menjadi semakin singkat

setelah RPJPN menetapkan tahun 2025-2029 sebagai target pemenuhan layanan dasar kesehatan (Bappenas, 2024). Target ini menjadi semakin terancam untuk tidak tercapai apabila kasus *bullying* di PPDS tidak kunjung dituntaskan.

Bukti ketidaktegasan Undip dalam menuntaskan kasus *bullying* dapat dilihat dari pernyataan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) yang menyadari dan mengakui bahwa sistem pendidikan dokter spesialis itu ada perundungan, tetapi langkah penyelesaian baru mulai intensif setelah timbul korban jiwa (CNN Indonesia, 2024). Bahkan, sebelum adanya pengakuan tersebut Undip pernah menyanggah dugaan perundungan melalui Siaran Pers Nomor 647/UN7.A/TU/VIII/2024. Sebagaimana diketahui bahwa saat siaran pers diterbitkan (15/08/2024), kepolisian justru belum menerbitkan hasil laporan investigasi resmi.

Munculnya kasus *bullying* di lingkungan FK Undip juga bukan pertama kali terjadi. Pada akhir Agustus 1986, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan berita *bullying* yang menimpa mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Undip (Yudiawan, 2017). Kehebohan itu bermula dari sebuah foto yang menampilkan mahasiswa FK Undip sedang disuruh menggigit katak hidup sembari berjongkok. Tidak lama kemudian, foto tersebut dimuat dalam halaman utama Pikiran Rakyat edisi 2 September 1986 (Yudiawan, 2017). Alhasil, Undip mendapat banyak kecaman dari publik. Pihak yang tak luput mengecam aksi *bullying* di Undip adalah Ketua Umum MUI, K.H Hasan Basri (Yudiawan, 2017). Pada saat itu, beliau sempat meminta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengeluarkan aturan tegas tentang batas perpeloncoan yang marak terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, pihak Undip sempat menyampaikan bahwa sisi lain dari kegiatan tersebut adalah supaya mahasiswa tidak gampang jijik.

Walaupun, bermaksud baik, tetapi cara tersebut tetaplah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi Undip memiliki visi berupa “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul” dan *tagline* berupa “*The Excellent Research University*” (Undip, 2016). Dalam mencapai visi

tersebut, tentu Undip membutuhkan Sumber Daya Mahasiswa yang kompeten. Namun, perlu diingat juga bahwa mahasiswa yang kompeten akan lahir dari lingkungan belajar yang kondusif dan bebas *bullying*. Hal ini seharusnya dapat didukung dari misi Undip untuk “Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif” dan “Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi”.

Tidak hanya itu, Undip juga memiliki nilai-nilai yang diambil dari sosok Pangeran Diponegoro. Kini nilai tersebut sedang terus ditanamkan oleh Undip kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan para tenaga kependidikan. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah Jujur, Berani, Peduli, dan Adil (Undip, 2016). Pada nilai jujur, seluruh *civitas academica* Undip diharapkan mampu berkata apa adanya; ber lurus hati; dan tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian, pada nilai berani tersirat makna untuk tidak takut dalam membela kebenaran. Selanjutnya, pada nilai peduli disematkan makna untuk memperhatikan keadaan sekitar. Terakhir, nilai adil mengajarkan supaya *civitas academica* Undip dapat memperlakukan sesama manusia sesuai dengan proporsinya dan berpihak pada kebenaran.

Namun, kenyataannya nilai itu justru telah dicerai oleh oknum *civitas academica* Undip sendiri. Seperti halnya pada nilai adil, sejatinya nilai tersebut tidak hanya muncul dalam nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, nilai tersebut juga muncul dalam tujuh belas arah pembangunan Indonesia, tepatnya di misi nomor empat. Misi tersebut menyatakan “*Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia*” (Bappenas, 2024). Dengan demikian, guna mencapai visi Indonesia Emas 2045 maka dibutuhkan hukum yang berkeadilan dan demokrasi substansial dalam setiap lini kehidupan. Apabila dunia pendidikan tidak mampu menerapkan hukum yang berkeadilan, maka pastinya hal ini dapat menjadi ancaman berbahaya bagi Indonesia Emas 2045. Sudah seharusnya pelaku

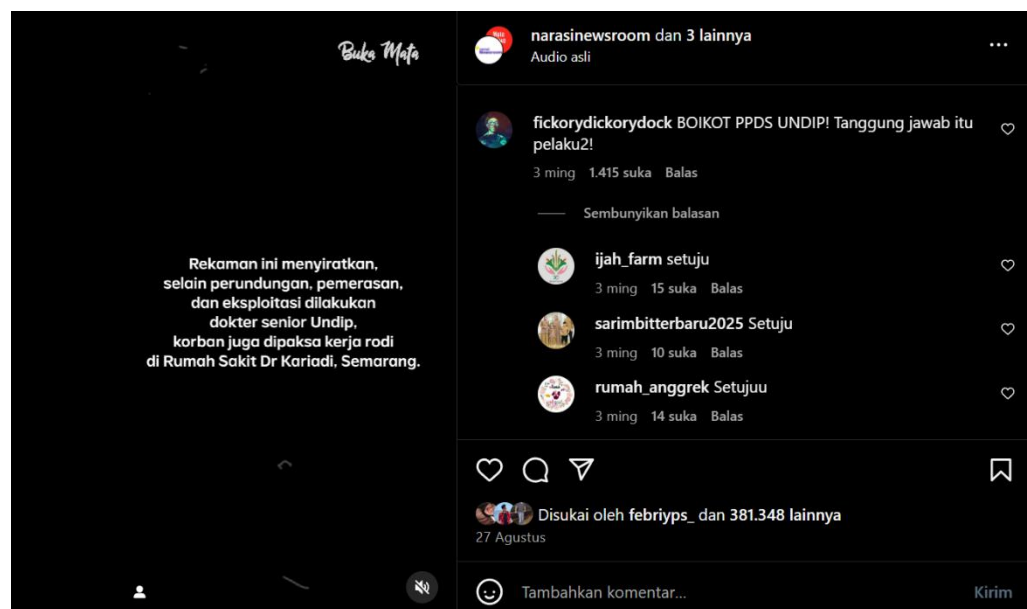
tindak *bullying* dalam dunia pendidikan diberikan sanksi tegas untuk memberantas.

Pada kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip, diketahui mahasiswa memiliki jam kerja berlebih, yaitu sekitar 80 jam perminggu atau hanya tidur 2-3 jam sehari (Iman, 2024b). Lebih beratnya lagi, terkadang mahasiswa PPDS Undip harus bekerja selama 24 jam tanpa tidur (Iman, 2024b). Padahal, idealnya mahasiswa PPDS itu berhak mendapat waktu istirahat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pasal 219 ayat (1) (Indonesia, 2023). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 218 ayat (2) berhak:

- a. memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan;
- b. memperoleh waktu istirahat;
- c. mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan; dan
- e. mendapat imbalan jasa pelayanan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan.

Merujuk pada Undang-Undang tersebut, maka artinya kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, munculnya kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip juga menjadi bukti bahwa gerakan *zero bullying* yang diterapkan oleh Fakultas Kedokteran Undip belum berjalan dengan optimal. Sebelumnya gerakan ini juga pernah disuarakan oleh Fakultas Kedokteran Undip pada saat penyambutan dan orientasi institusi PPDS dan PPDSS atau tepatnya ditanggal 23-24 Januari 2024 (Undip, 2024a).

Setelah pemberitaan tentang gerakan *zero bullying*, kini Undip harus berhadapan dengan media yang ramai memberitakan soal kasus *bullying* PPDS Undip. Media-media tersebut di antaranya seperti, narasi, tempo, TvOneNews, detik.com, kompas.com, medcom.id, bbc, CNN Indonesia, Kumparan, Liputan6.com, dan lain-lain. Banyaknya media yang memberitakan hal tersebut membuat Undip menjadi banjir kecaman. Kecaman tersebut dapat ditinjau secara langsung melalui kolom komentar instagram @narasinewsroom yang menunjukkan opini masyarakat terhadap Undip.



Gambar 1. 3 Tangkapan layar pada kolom komentar akun instagram @narasinewsroom

Effendi (2003) berpendapat bahwa opini itu tidak mempunyai strata, tetapi mempunyai arah yang positif; netral; dan negatif (Juditha, 2014). Suatu opini dikatakan memiliki arah yang positif apabila bereaksi secara menyenangkan terhadap suatu persoalan (Juditha, 2014). Sedangkan, opini netral adalah opini yang tidak memengaruhi keadaan dalam suatu persoalan (Juditha, 2014). Terakhir, yaitu opini negatif yang berarti berisikan reaksi tidak menyenangkan atau beranggapan buruk pada suatu persoalan (Juditha, 2014).



Gambar 1. 4 Komentar negatif di akun instagram @undip.official

Dari 3.234 komentar di instagram @undip.official, mayoritas opini publik cenderung mencaci maki Undip dan mengajak untuk tidak berkuliah di Undip. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mengaku sebagai alumni Undip, tetapi menyatakan tidak bangga terhadap almamaternya karena kasus *bullying*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mayoritas opini publik memiliki kecenderungan ke arah negatif. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ditemukan opini positif sama sekali. Opini positif masih dapat ditemukan, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Indikator opini mengarah positif dapat dilihat dari komentar yang berisikan harapan dan dukungan kepada Undip (Li dkk., 2025). Sedangkan, opini negatif diidentifikasi dari adanya kalimat yang berisikan kepanikan, kesedihan, dan kemarahan (Li dkk., 2025).

Komentar



bagas.7211 9 mg

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selaku dari universitas Pamulang Tangerang Selatan izin menyampaikan suara dan keluhan almarhum tersebut walaupun saya bukan universitas siapa-siapa dan bukan universitas UNDIP di situ oke larangan pertama membuat klasifikasi sudah benar akan tetapi zerobulinya itu apa seharusnya universitas UNDIP ada cctv kalau ada pembulian kenapa CCTV tersebut tidak ditayangkan siapa tahu almarhum tersebut minta tolong dikarenakan ada senioritas senioritas atasan-atasan dan bahkan ribuan bukan hanya ratusan situ ada semua saya yakin kenapa tidak ditindaklanjuti mohon mohon kampus merdeka diperiksa kembali dan dari tahun ke tahun beberapa persen perempuan yang di pelecehan seksual atau pembulian tersebut bukannya universitas menghangatkan memperkuat solidaritas mencerdaskan nama bangsa dan lalu mengapa ditutup-tutupin apakah si rektor tersebut ada sangkut paut dari senioritas atau sudah diselundupkan uang kita nggak tahu Semoga aja kedepannya bisa memperbaiki universitas tersebut terima kasih sehat-sehat selalu untuk universitas salam sehat salam sukses jaga diri jaga mental dan semuanya thank you



Komentar



nabillafpr_ 7 mg

Min, jangan bikin malu undip😭 undip salah satu kampus besar, masuk top 10 universitas terbaik...masa seperti ini? ayo dong diusut tuntas dan berani bertindak tegas!



— Lihat 1 balasan lainnya

Gambar 1. 5 Komentar positif di akun instagram @fkundip.official

Komentar



Pliss UNDIP,, be fair!! Jangan melindungi kejahatan.. Selama ini ak bangga jd lulusan UNDIP, tp hilang kebanggaanku gr2 kasus ini.. VN almarhum sdh beredar, kalo msh punya nurani pasti ga akan tega. Wallahi ga akan tenang kalian para pembully dan pelindung si pembully.. Tdk hanya d dunia, tp kalian bawa sampai ke akhirat kelak...

Balas



Ngga bangga jadi alumni kampus yg melindungi pelaku bullying

Balas



Maaf ya aku juga alumni undip tp dari fakultas lain. Untk pertama kalinya aku ga bangga dengan almamaterku, dengan kampusku. Mungkin ini memang dilakukan oleh "oknum" Tapiin seharusnya pihak kampus tidak perlu menutupi kasus ini. Mahasiswa/i datang ke kampus untuk belajar bukan untuk "dihajar".



Duh, sebagai alumni saya merasa kecewa. Cukup lah minta maaf dan berbela sungkawa. Mana ada investigasi internal secepat ini. Yakin statement ini bakal dirujak Netizen. Siap2 Pak Rektor, tandangan Anda mewakili Undip secara keseluruhan.

26

Komentar



Kampus TOP isinya begini? Tukang bully semua? Bahkan pihak kampus pun menutupi? Mau mengembangiakan tukang bully kah? Duh, sekelas UNIDIP kayak isinya? Udah speechless sih gak bisa berkata2 lagi. Pihak fakultas, dekanat, rektorat gausah nutupin ya, cepet bgt perasaan keluarin pernyataan, gemetar ya dek ya? Panik ya dek ya? Takut ketahuan busuknya ya dek ya? Wah patut dipertanyakan kredibilitas ini universitas, akreditasinya apa nih? A? A for perkembangbiakan bully? Kalau kasus ini tidak diusut tuntas parah sih ya [@kemenkes_ri](#), berapa banyak lagi korban senioritas dan bully yg akan meregang nyawa. Silahkan selidiki secara mendalam dan siapkan sanksi terberat [@kemenkes_ri](#)

“ Gambar 1. 7 Komentar dari masyarakat
♥ yang mengetahui Undip sebagai PTN
2 bereputasi baik

Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan merupakan faktor pembentuk persepsi. Secara definisi, persepsi merupakan proses di mana manusia menjadi sadar akan keberadaan objek, peristiwa, dan orang lain melalui pancaindera mereka (DeVito, 2018). Kemudian, persepsi juga didefinisikan sebagai observasi mengenai objek, peristiwa atau relasi-relasi yang didapatkan melalui penyimpulan informasi dan penafsiran pesan (Supratman & Intyaswati, 2019). Jika, diklasifikasikan, maka faktor pengetahuan tergolong sebagai faktor *frame of refference* (Supratman & Intyaswati, 2019). Kemudian, faktor lain yang juga memengaruhi pembentukan persepsi adalah faktor *frame of experience* (Supratman & Intyaswati, 2019). Dalam hal ini, *frame of experience* dimaknai sebagai faktor yang berlandaskan pada pengalaman dan lingkungan sekitar. Sedangkan, *frame of refference* adalah faktor yang berlandaskan pada kerangka pengetahuan seseorang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bacaan (Supratman & Intyaswati, 2019). Dengan persepsi tersebut, maka selanjutnya terbentuklah opini publik.

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian “*Pengaruh Terpaan Informasi Mengenai Kasus Bullying Mahasiswa PPDS Undip di Media Sosial dan Persepsi Masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap Opini Publik*” menjadi penting untuk diteliti. Jika, penelitian ini tidak segera dilakukan, maka hal ini berisiko pada reputasi Universitas Diponegoro yang berubah menjadi buruk dimata masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Undip merupakan PTN-BH yang bereputasi baik. Beragam prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional telah berhasil didapatkan oleh Undip. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi Undip untuk dapat menjaga prestasi itu melalui penerapan sistem pendidikan yang sesuai dengan pedoman ideal. Pedoman ideal yang dimaksud tidak lain adalah pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dokumen RPJPN 2025-2045, SDGs poin empat, peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, dan nilai-nilai serta visi misi dari Undip sendiri.

Namun, pada faktanya tidak semua pedoman itu berhasil diterapkan oleh Undip. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus *bullying* yang menimpa mahasiswa PPDS Undip hingga viral di media sosial. Sebab banyak media yang memberitakan, akibatnya banyak juga kecaman yang muncul dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada akun instagram @undip.official yang kolom komentarnya dibanjiri dengan caci maki dan ajakan untuk tidak berkuliah di Undip. Pihak yang memberi komentar itu pun tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga masyarakat yang mengaku sebagai alumni Undip.

Oleh karena itu, berdasarkan pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian berupa “Seberapa besar pengaruh terpaan informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial terhadap opini publik” dan “Seberapa besar pengaruh terpaan informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial dan persepsi masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap opini publik”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah

1. Menjelaskan pengaruh terpaan informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial terhadap opini publik.
2. Menjelaskan pengaruh terpaan informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial dan persepsi masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap opini publik.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Harapannya terdapat kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini pada bidang kajian komunikasi massa, terkhusus untuk memverifikasi teori media dependency dan teori spiral of silence.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Harapannya terdapat informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengelola opini publik.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Harapannya penelitian ini dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik antara Universitas Diponegoro dengan masyarakat luas.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 State of The Art

Penelitian pertama ditulis oleh Melinda Swanson Whitman dengan judul *“Media Influence on the Public Opinion of Criminal Justice Issues and Policies: A Quantitative Descriptive Study”*. Penelitian ini bermula dari permasalahan “Apakah media telah membentuk opini publik tentang isu peradilan pidana?” Masalah umum dari penelitian ini adalah misinformasi dan pembesaran peristiwa peradilan pidana oleh media yang berdampak signifikan secara sosial dan budaya. Peristiwa yang dibesar-besarkan seringkali menimbulkan kepanikan moral yang dapat membuat perencanaan Undang-Undang menjadi tidak baik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan bagaimana responden memandang liputan media tentang isu peradilan pidana, apakah kebutuhan kognisi responden berdampak pada keakuratan opini mereka; dan sejauh mana responden percaya bahwa media memengaruhi penciptaan kebijakan peradilan pidana. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe deskriptif dan pendekatan kuantitatif non eksperimental. Sumber yang dipakai pada penelitian ini adalah data survei yang diambil dari pengguna Facebook asal Amerika Serikat dan sedang tidak bekerja atau sebelumnya bekerja disistem peradilan pidana. Kemudian, teori *media framing*, *agenda setting*, *priming*, dan semiotika menjadi empat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya ditemukan bahwa mereka yang mengandalkan bacaan di media sosial seringkali membentuk

opini berdasarkan informasi yang tidak akurat. Mereka tergolong sebagai orang yang tidak mencari ilmu dalam hal apapun dan cenderung tidak mencari berita dari sumber berita tradisional.

Kemudian, penelitian kedua ditulis oleh Daniel Michael Merkle dengan judul *“The Influence of Prior Attitudes and Media Exposure on Perceptions of Public Opinion”*. Penelitian ini berawal dari masalah opini publik yang dipandang sebagai kekuatan yang kuat dalam dunia politik. Opini publik dianggap dapat memengaruhi pembuat kebijakan dan preferensi serta perilaku warga biasa. Namun, pengaruh ini diduga tidak disebabkan secara langsung oleh opini publik. Ada faktor lain yang diduga memengaruhi pembentukan opini publik, yaitu persepsi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hal yang memengaruhi kemampuan untuk membuat estimasi opini publik dan mengetahui sesuatu yang memengaruhi persepsi aktual individu terhadap opini publik. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari dua survei telepon terhadap orang dewasa yang dipilih secara acak di wilayah Chicago untuk menguji faktor yang dianggap memengaruhi persepsi opini, yaitu sikap individu sebelumnya dan paparan media massa. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori yang biasa disebut dengan *spiral of silence theory*. Hasilnya penelitian ini menemukan bahwa paparan media tidak terkait dengan kemungkinan membuat estimasi opini publik. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa sikap individu sebelumnya merupakan prediktor terkuat dari persepsi aktual opini publik.

Kemudian, penelitian ketiga ditulis oleh Rio S. Mancilla dengan judul *“Is There a Relationship Between Media Sources and Public’s Perception on Police?”*. Penelitian ini berawal dari masalah perbedaan persepsi publik terhadap polisi setelah mengonsumsi media yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah untuk memahami pengaruh sumber media terhadap persepsi publik terhadap polisi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif. Data diperoleh dari survei yang didistribusikan kepada sekitar 200 peserta yang berusia 21 tahun atau lebih, warga negara Amerika Serikat, dan menonton berita secara teratur atau erat berinteraksi dengan penegak hukum. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori kultivasi dari Gerbner, *social cognitive theory of mass communication*, teori keadilan prosedural sosial, dan teori pertukaran sosial. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara jenis sumber media dan persepsi publik terhadap polisi. Responden yang menjadikan media sosial sebagai sumber baca berita diketahui memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap polisi.

Selanjutnya, penelitian keempat ditulis oleh Taher A. Taher dengan judul *“Impact of Social Media On Public Perception of Government Covid-19 Response Efforts*. Penelitian ini bermula dari masalah *feedback* negatif atas kasus covid-19 yang lebih rendah dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kependudukan. *Feedback* ini berasal dari spekulasi bahwa kasus atau kematian yang diberitahukan itu lebih tinggi dari yang dilaporkan. Akhirnya publikasi tersebut mengarah pada persepsi negatif yang tidak beralasan terhadap upaya pemerintah untuk menanggapi pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi persepsi publik terhadap upaya pemerintah untuk menangani wabah covid-19. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari pengumpulan komentar Facebook pada statistik infografis harian covid-19 dari situs resmi Kementerian Kesehatan dan Kependudukan. Sampel diambil secara acak dari 546 komentar yang selanjutnya diberi peringkat positif atau negatif secara otomatis. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori *media effect theory* dan *social cognitive theory*. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kedua hipotesis yang diuji menggunakan model regresi berganda itu telah

terbukti benar. Semakin positif atau negatif komentarnya, maka semakin banyak pula jumlah balasan dan reaksi yang diterimanya.

Kemudian, penelitian kelima ditulis oleh Nurzali Ismail, dkk dengan judul *“Understanding Factors Influencing Crime Prevention Information on Social Media”*. Penelitian ini dimulai dari masalah meningkatnya atensi terhadap media sosial dan penelitian kepolisian, tetapi tidak diiringi dengan pembahasan khusus tentang faktor sumber desain pesan dan dampak yang dirasakan terhadap informasi pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui penyelidikan persepsi publik terhadap informasi pencegahan kejahatan. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan kuantitatif. Data akan didapatkan dari hasil survei yang dilakukan secara daring kepada 400 responden Malaysia yang berusia 18-34 tahun. Responden dalam usia ini dipilih karena terdapat literatur yang mengatakan bahwa pengguna media sosial aktif di Malaysia sebagian besar adalah kaum muda. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori pencegahan kejahatan di media sosial. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa persepsi masyarakat terhadap informasi pencegahan kejahatan yang dibagikan oleh aparat melalui media sosial adalah positif. Berdasarkan tiga faktor penting yang diteliti, yaitu kredibilitas, kualitas argumen, dan daya tarik, kredibilitas ditemukan sebagai prediktor signifikan yang memengaruhi dampak persepsi publik terhadap informasi pencegahan kejahatan di media sosial.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma positivistik menjadi paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. Ajaran dari positivistik memandang bahwa realitas itu bisa diamati, diukur, dan dapat diklasifikasikan (Mubarok, 2023). Selain itu, positivistik memiliki pandangan atas ilmu sosial sebagai metode terstruktur guna menyatukan logika deduktif dengan amatan empiris dari perilaku seseorang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi atas hukum sebab akibat yang bisa dipakai untuk meramal

pola aktivitas manusia. Oleh karena itu, paradigma positivistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji kebenaran objektif dari pengaruh terpaan informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial dan persepsi masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap opini publik.

1.5.3 Deskripsi Variabel

1.5.3.1 Terpaan Informasi

Terpaan informasi merupakan wujud interaksi antara individu dengan media komunikasi yang dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, opini dan perilaku mereka (McQuail, 2010). Sederhananya terpaan informasi merupakan intensitas audiens terpapar pesan dari media yang dapat memberikan efek kognitif, afektif, dan behavior. Menurut Rosengern, terpaan informasi dapat diukur melalui tiga indikator berikut (Deborah & Anggraeni, 2022)

1. Frekuensi

Frekuensi dapat dimaknai sebagai berapa kali audiens membaca, melihat, dan mendengarkan isi pesan media massa (Durhan & Tahir, 2021);

2. Durasi

Durasi dapat dimaknai sebagai seberapa lama seseorang menyaksikan, membaca, dan mendengarkan isi pesan media massa (Durhan & Tahir, 2021);

3. Atensi

Atensi dapat dimaknai sebagai tingkat perhatian dan ketertarikan audiens dalam menyimak isi pesan media massa.

Secara lebih rinci, terpaan merupakan aktivitas audiens untuk menyaksikan, mendengarkan, dan membaca isi pesan dari media (Deborah & Anggraeni, 2022). Sedangkan, menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, informasi merupakan “Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik”.

1.5.3.2 Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman yang berkaitan dengan objek, kejadian, atau relasi-relasi yang didapatkan dari aktivitas menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2018). Selain itu, persepsi juga dimaknai sebagai pemberian makna pada stimulus indrawi atau *sensory stimuli*. Oleh karena itu, proses penafsiran makna informasi indrawi dilakukan dengan melibatkan lima elemen yang juga menjadi indikator pengukuran variabel persepsi (Rakhmat, 2018)

1. Atensi

Menurut Kenneth E. Andersen, atensi merupakan proses mental di mana manusia hanya fokus pada satu stimulus saja dibandingkan dengan stimulus lainnya (Rakhmat, 2018). Sederhananya, atensi merupakan proses di mana manusia memilih untuk memberikan perhatian lebih pada stimulus tertentu dibandingkan stimulus lainnya.

2. Ekspektasi

Ekspektasi merupakan bagian dari proses kognitif manusia untuk memperkirakan perilaku komunikasi pihak lain berdasarkan atas harapan atau prediksi dari interaksi itu (Sunanto, 2016).

3. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan yang muncul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dorongan ini dapat muncul secara sadar maupun tidak sadar.

4. Memori

Schlessinger dan Groves mengatakan bahwa memori adalah sebuah sistem yang bersifat terstruktur sehingga organisme mampu menyimpan fakta tentang dunia dan memakai pengetahuan itu sebagai landasan berperilaku (Rakhmat, 2018).

1.5.3.3 Opini Publik

Menurut Gungun dan Rumar, opini publik adalah aktivitas untuk menyampaikan sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat (Supratman & Intyaswati, 2019). Sedangkan, menurut Syahputra opini publik adalah pendapat, ide, ataupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui perantara media (Korniawan, 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa opini publik merupakan aktivitas penyampaian pendapat dari masyarakat ke pihak tertentu melalui perantara media.

Opini publik yang muncul di media cenderung bersifat subjektif. Biasanya opini itu akan berisikan tentang persetujuan ataupun pertentangan terhadap suatu masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut pendapat Arifin, opini publik itu setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu (Aisyah & Hasfi, 2022)

1. Peristiwa harus bersifat penting, aktual, dan berkaitan dengan kepentingan bersama serta dipublikasikan di media massa;
2. Peristiwa tersebut dibahas oleh beberapa orang dan menghasilkan kesepakatan dalam bentuk sikap, pendapat, serta pandangan;

3. Opini publik disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, lisan, dan gestur.

Berhubung opini publik diklasifikasikan menjadi positif, netral, dan negatif, maka diperlukan pengukuran untuk mengetahuinya. Pengukuran variabel opini publik dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut (Li dkk., 2025)

1. Kepanikan

Mencerminkan rasa takut dan cemas yang dialami oleh masyarakat terhadap keamanan pendidikan di Universitas Diponegoro.

2. Kesedihan

Menggambarkan kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap korban *bullying*.

3. Kemarahan

Menggambarkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat terhadap Universitas Diponegoro.

4. Harapan

Menggambarkan keinginan masyarakat terhadap Universitas Diponegoro.

5. Dukungan

Menggambarkan dukungan publik terhadap Universitas Diponegoro.

Dari kelima indikator tersebut, dua indikator dikategorikan sebagai indikator opini publik yang positif. Indikator tersebut adalah harapan dan dukungan. Sedangkan, tiga indikator lainnya akan menjadi indikator opini publik yang mengarah ke negatif.

1.5.3.4 Pengaruh Terpaan Informasi Mengenai Kasus *Bullying* Mahasiswa PPDS Undip terhadap Opini Publik

Teori media dependency diusulkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur dengan klaim bahwa khalayak memiliki ketergantungan terhadap informasi media untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu (Littlejohn dkk., 2021). Kebutuhan tertentu yang dimaksud bisa berupa hiburan, berbagi atau menerima informasi, menghubungi teman, dan memantau aktivitas pemerintah. Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang menentukan besaran ketergantungan seseorang terhadap media adalah (Littlejohn dkk., 2021)

1. Media mampu memenuhi beragam kebutuhan;
2. Stabilitas sosial;
3. Budaya atau kondisi sosial;
4. Terpaan selektif dan kepercayaan pada terpaan tersebut.

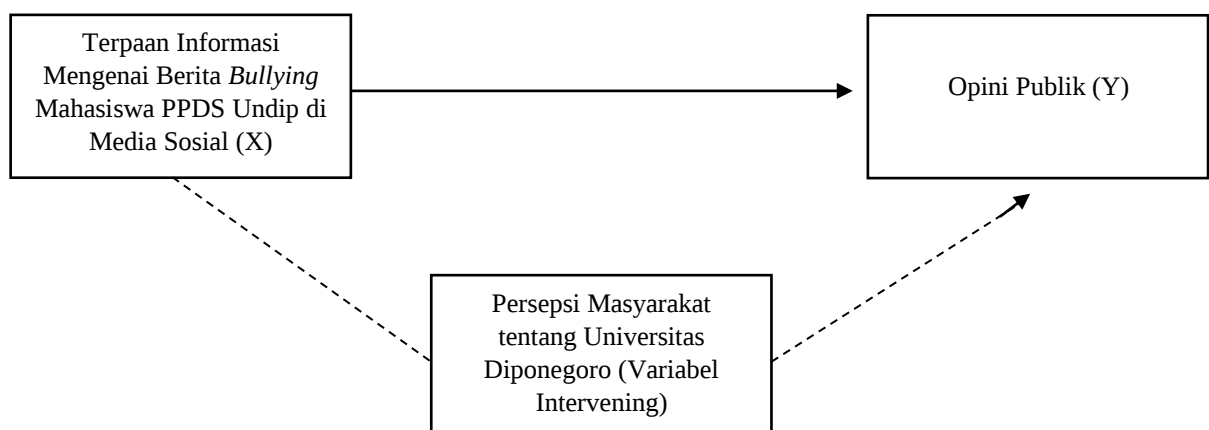
Pada prinsipnya teori ini mengatakan bahwa individu yang semakin tergantung pada informasi media cenderung mudah lebih terpengaruh secara kognitif maupun emosional/sikap (Littlejohn dkk., 2021). Namun, kalau individu tersebut tidak mau bergantung pada media maka ia harus berhadapan dengan tantangan berupa kesulitan menjangkau informasi. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan akses dan jarak antara individu dengan objek berita. Jadi, biasanya khalayak akan tetap bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan informasi.

1.5.3.5 Pengaruh Terpaan Informasi Mengenai Kasus *Bullying* Mahasiswa PPDS Undip dan Persepsi Masyarakat tentang Universitas Diponegoro terhadap Opini Publik

Teori spiral of silence atau spiral kebisuan berhubungan dengan proses pembentukan opini publik. Elizabeth Noelle-Neuman menjadi tokoh penting dibalik kemunculan teori ini

pada tahun 1974 (Rohim, 2016). Teori ini mengatakan bahwa individu menyampaikan opini mereka berdasarkan isyarat atau petunjuk yang mereka dapat dari lingkungan sekitar (Cobis & Rusadi, 2023). Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa opini publik itu terbentuk melalui proses yang melibatkan tiga hal, yaitu komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan persepsi individu dengan pertimbangan pendapat umum dari orang lain (Rohim, 2016). Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa opini individu itu sangat bergantung dengan pemikiran atau harapan oleh orang lain (Rohim, 2016).

Merujuk pada asumsi tersebut maka teori ini menjelaskan bahwa setiap individu itu biasanya akan berusaha menghindari pendapat dan menyimpan keyakinan tertentu dalam diam apabila keyakinan itu tidak banyak didukung secara sosial (Rohim, 2016). Oleh karena itu, terdapat dua premis yang muncul dalam penjelasan teori ini. Premis pertama adalah orang dapat memahami tentang pendapat mana yang berlaku dan pendapat mana yang tidak berlaku (Littlejohn dkk., 2017). Premis kedua adalah orang menyesuaikan ekspresi pendapat mereka dengan persepsi sosial (Littlejohn dkk., 2017).



Gambar 1. 8 Geometri Hubungan

1.6 Hipotesis

Merujuk pada penjelasan teori tersebut, maka disusunlah hipotesis, yaitu

H1 : Terdapat pengaruh positif pada terpaan informasi (X) terhadap opini publik (Y). Artinya, semakin tinggi terpaan informasi *bullying* yang diterima maka opini publiknya menjadi semakin negatif.

H2 : Terdapat pengaruh negatif pada terpaan informasi (X) dan persepsi masyarakat (Variabel Intervening) terhadap opini publik (Y). Artinya, semakin tinggi terpaan informasi *bullying* yang diterima dan semakin positif persepsi yang dimiliki maka opini publik akan berubah menjadi positif.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Terpaan Informasi

Terpaan informasi adalah wujud interaksi antara seseorang dengan media komunikasi yang dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, opini dan perilaku mereka (McQuail, 2010).

1.7.2 Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman yang berkaitan dengan objek, kejadian, atau relasi-relasi yang didapatkan dari aktivitas menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2018).

1.7.3 Opini Publik

Opini publik adalah pendapat, ide, ataupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui perantara media (Korniawan, 2020).

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Terpaan Informasi Mengenai Kasus *Bullying* Mahasiswa PPDS Undip di Media Sosial

Seberapa sering orang-orang IKA Undip terpapar informasi mengenai kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial. Informasi yang dimaksud boleh diterima bentuk video, infografis, maupun artikel. Oleh karena itu, variabel ini akan diukur dengan menggunakan indikator berikut ini

1. Frekuensi

Responden mampu menyebutkan seberapa sering dirinya membaca, melihat, dan/atau mendengarkan berita soal kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial;

2. Durasi

Responden mampu menyebutkan seberapa lama dirinya membaca melihat, dan/atau mendengarkan berita soal kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial;

3. Atensi

Responden mampu menjawab apakah dirinya selalu menyimak berita kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip sampai selesai atau tidak.

1.8.2 Persepsi Masyarakat tentang Universitas Diponegoro

Pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang IKA Undip tentang Universitas Diponegoro setelah menafsirkan berita *bullying* mahasiswa PPDS Undip. Persepsi sendiri dapat diukur dengan indikator sebagai berikut

1. Atensi

Responden mampu menyatakan persetujuan bahwa informasi tentang *bullying* mahasiswa PPDS Undip menarik untuk diikuti;

2. Ekspektasi

Responden mampu menilai bahwa Undip dapat merespons aspirasi publik dengan baik;

3. Motivasi

Responden mampu menyatakan persetujuan bahwa dirinya akan merekomendasikan Undip kepada orang lain;

4. Memori

Responden mampu mengingat bahwa Undip menduduki peringkat baru pada bulan Juni 2024 menurut QS World University Ranking.

1.8.3 Opini Publik

Pendapat, ide, ataupun kritik dari orang-orang IKA Undip terhadap Undip setelah muncul berita kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip. Pendapat ini bisa dikategorikan menjadi tiga arah, yaitu negatif, netral, dan positif (Juditha, 2014). Oleh karena itu, diperlukan indikator pengukuran variabel sebagai berikut

1. Kepanikan

Responden mampu menyatakan persetujuan bahwa kasus *bullying* mahasiswa PPDS Undip memicu kepanikan dan kecemasan terhadap keamanan studi di Undip;

2. Kesedihan

Responden mampu menyatakan persetujuan bahwa dirinya merasa sedih atas kejadian yang menimpa korban;

3. Kemarahan

Responden mampu mengungkapkan perasaan marah dan tidak puas terhadap Universitas Diponegoro;

4. Harapan

Responden mampu menyampaikan harapan agar Undip berbenah menjadi lebih baik;

5. Dukungan

Responden mampu menyatakan persetujuan bahwa dirinya akan tetap mendukung kemajuan Undip walau pernah ada kasus *bullying*.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian eksplanatori. Nantinya penelitian ini akan melihat pengaruh terpaan informasi mengenai berita *bullying* mahasiswa PPDS Undip dan persepsi masyarakat terhadap opini publik. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan logika berpikir deduktif. Logika berpikir deduktif berarti melibatkan perpindahan dari sesuatu

yang luas menuju sesuatu yang lebih spesifik (Jaana & Urs, 2018). Hal ini dimisalkan dengan memulai penelitian dari sebuah teori, menarik hipotesis dari teori tersebut, dan merevisi teori (Jaana & Urs, 2018).

1.9.2 Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada keseluruhan individu yang ada dalam sebuah kelompok, kejadian, atau sesuatu menarik yang ingin diteliti (Sekaran & Bougie, 2016). Pada konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pengguna media sosial aktif yang pernah terterpa berita *bullying* mahasiswa PPDS Undip. Sedangkan, sampel merupakan bagian dari populasi, tetapi tidak semua elemen masuk didalamnya (Sekaran & Bougie, 2016). Pada penelitian ini, sampel yang dipilih adalah orang-orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip). Kelompok ini dipilih sebagai sampel karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai mahasiswa Undip. Dengan demikian, mereka dianggap telah memiliki persepsi tersendiri terhadap Undip. Selain itu, IKA Undip juga merupakan mitra potensial bagi Undip untuk memajukan dan mengembangkan kampus. Jadi, perlu diketahui terkait pengaruh terpaan informasi *bullying* mahasiswa PPDS Undip terhadap opini publik mereka. Jika, terpaan itu terbukti memberi pengaruh buruk bagi Undip, maka hubungan baik antara kedua kelompok menjadi terancam. Kemungkinan dampak buruknya lagi adalah Undip tidak lagi mendapat dukungan dari IKA Undip. Sampel dalam penelitian ini akan diambil sejumlah 96 sampel. Jumlah ini ditentukan berdasarkan rumus *Cochran* atau rumus untuk menentukan sampel yang tidak diketahui jumlah populasinya (Sugiyono & Lestari, 2021)

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel yang dibutuhkan

z= Harga pada kurve normal untuk simpangan 5% dengan nilai 1,96

p= Kesempatan benar sebesar 50% = 0,5

q = Kesempatan salah sebesar 50% = 0,5

e = Sampling error sebesar 10%

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Dengan demikian, tidak semua individu dalam sebuah populasi mendapat kesempatan yang setara untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik *non-probability* dipilih karena tidak terdapat *population frame* dalam populasi yang dipilih. Sedangkan, jenis sampling yang digunakan nantinya adalah *purposive sampling*. Maksud dari *purposive sampling* adalah pembatasan pengambilan sampel pada orang tertentu yang memiliki informasi atau sesuai dengan kriteria penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Tipe *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *quota sampling*. *Quota sampling* dipilih karena penelitian ini membutuhkan data dari orang-orang IKA Undip yang pernah terterpa berita *bullying* mahasiswa PPDS Undip di media sosial.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian akan bersumber pada data primer. Data primer dimaknai sebagai data yang didapatkan secara langsung dari lokasi pengamatan atau dari orang pertama tanpa adanya pengolahan dari pihak (Bramanto, 2024). Data dari penelitian ini akan diperoleh melalui penyebaran angket kepada target responden.

1.9.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian survei. Survei tersebut akan dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat untuk memperoleh data. Menurut Zaenal Arifin, angket adalah alat penelitian yang berisi susunan pertanyaan atau pernyataan guna mendapat informasi yang dibutuhkan peneliti dari responden (Ernawati & Setiawaty, 2021).

1.9.6 Teknik Pengolahan Data

1.9.6.1 Coding

Pengolahan data akan dimulai dari pengodean data (Sekaran & Bougie, 2016). Pengodean data akan dilakukan dengan memberikan nomor pada hasil angket dari responden sehingga hasil tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data (Sekaran & Bougie, 2016).

1.9.6.2 Editing

Tahap setelah coding adalah editing. Pengeditan data berhubungan dengan pengidentifikasian dan perbaikan data yang tidak masuk akal serta tidak konsisten dari hasil *feedback* responden (Sekaran & Bougie, 2016).

1.9.6.3 Tabulasi

Tahap terakhir setelah data diedit adalah mengolahnya menjadi bentuk tabel dan disusun berdasarkan pembagian kategori tertentu.

1.9.7 Uji Validitas

Uji validitas berarti menguji instrumen pengukuran itu sendiri (Sekaran & Bougie, 2016). Proses pengujian instrumen digunakan untuk memastikan bahwa serangkaian pertanyaan yang telah dibuat itu benar-benar bertujuan untuk mengukur konsep yang ingin diukur (Sekaran & Bougie, 2016).

1.9.8 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau uji keandalan data akan menunjukkan sejauh mana pengukuran data yang dilakukan itu bebas dari kesalahan (Sekaran & Bougie, 2016). Oleh karena itu, uji reliabilitas akan memastikan pengukuran berjalan secara tetap dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan diberbagai item instrumen (Sekaran & Bougie, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keandalan data pengukuran adalah alat yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu konsep akan tetap stabil dan konsisten saat diukur (Sekaran & Bougie, 2016).

1.9.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). SEM adalah teknik analisis multivariate yang bisa digunakan untuk menguji hubungan antara variabel kompleks (Ghozali, 2011a). Secara bersamaan, penelitian ini juga dapat menguji model struktural dan model measurement. Hasilnya penelitian ini akan dapat menguji kesalahan pengukuran dan melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian hipotesis (Ghozali, 2011a). Selain itu, model SEM dipilih karena memiliki tujuan yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu memastikan model yang dibuat adalah benar dan menguji hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya (Ghozali, 2011a).

Kemudian, metode PLS-SEM ini dipilih karena bersifat *distribution free*; tidak berasumsi pada skala pengukuran tertentu; dan jumlah sampelnya kecil (Ghozali, 2011b). Selain itu, penggunaan metode ini juga didasarkan pada ketidaksesuaian data yang akan dianalisis dengan kriteria *covariance based SEM* atau *hard modeling* (Ghozali, 2011b). Dalam hal ini, contoh kriteria *covariance based SEM* yang tidak terpenuhi adalah jumlah sampel, Jika, jumlah sampelnya kecil, maka *hard modeling* berpotensi menghasilkan *type II error* (Ghozali, 2011b).